

MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN

Ipah Parihah Padilah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
E-mail: ipahparihahpadilah@gmail.com

Yaya Suryana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
E-mail: yayasuryana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang mencakup profil, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan diklat, serta hasil manajemen penyelenggaraan diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi guru di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan menyalin dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan penafsiran deskriptif semata-mata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru di Balai Diklat Keagamaan Bandung terdiri dari perencanaan yang meliputi: (1) analisis kebutuhan diklat, (2) rapat kerja, (3) rapat koordinasi, (4) strategi pendekatan, dan (5) penyusunan bahan. Pelaksanaan diklat dilakukan melalui: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap pelaporan. Evaluasi yang terdiri dari: (1) evaluasi terhadap peserta, (2) evaluasi terhadap Widyaiswara, dan (3) evaluasi terhadap penyelenggara.

Kata Kunci: Manajemen, Pelatihan, dan Guru

Abstract

The aim of this research is to determine the management of training and development program in Bandung Religious Training Center, which includes a profile, planning, implementation, evaluation, enabling and inhibiting factors of training and development, and the results of management of training and development program to increase the competence of teachers in Bandung Religious Training Center. The method used is descriptive qualitative method. Data collected by interview, observation and copying documents. Analysis of the data used is the analysis of the purely descriptive interpretation. These results

indicate that the Management of Training and Development Program Functional Improvement of Teacher Competence in Balai Diklat Keagamaan Bandung consists of planning which includes: (1) Training Needs Analysis, (2) work meetings, (3) coordination meetings, (4) strategy approach, and (5) preparation of materials. Implementation of the training is done through: (1) preparation, (2) the implementation phase, and (3) reporting stage. The evaluation consisted of: (1) evaluation of the participants, (2) evaluation of the lecturer, and (3) evaluation of the organizers.

Keywords : *Management, Training, and Teacher.*

Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Untuk itu, perhatian organisasi untuk SDM harus dilakukan terus menerus dengan memelihara serangkaian kegiatan dan program-program yang bersifat pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan SDM dalam dunia pendidikan dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil (Diklat PNS) merupakan “proses transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang menyentuh empat dimensi utama, yaitu dimensi spiritual, intelektual, mental, dan fisik yang terarah pada perubahan-perubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya manusia aparatur negara tersebut” (Sedarmayanti, 2013: 379).

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dijelaskan bahwa Balai Diklat Keagamaan adalah lembaga yang merupakan institusi strategis, sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan mampu memberikan kontribusinya untuk turut meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada umumnya dan kualitas guru pada khususnya, melalui pelaksanaan Diklat yang efektif dan efisien. Diklat fungsional peningkatan kompetensi ini pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh para tenaga pendidikan, sesuai yang tertera pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pendidikan merupakan akitivitas pembelajaran yang lebih luas dan dalam dibandingkan pelatihan. Pelatihan lebih berkaitan dengan pengembangan keterampilan tertentu, sedangkan pendidikan lebih berkaitan dengan tingkatan-tingkatan pemahaman secara umum. Dari dua kata tersebut kemudian disatukan menjadi pendidikan dan pelatihan yang lebih dikenal dengan “diklat” yang memiliki makna tersendiri. Adapun pendidikan dan pelatihan (diklat) menurut Nedler dalam Abdorrahman Ginting (2011:8) adalah suatu proses belajar untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap yang baru untuk mempersiapkan seseorang agar mampu melakukan pekerjaan yang saat ini menjadi tanggung jawabnya atau yang akan menjadi tanggungjawabnya kelak sebagai bagian dari perkembangan individu maupun organisasi dimana ia bekerja.

Manajemen atau pengelolaan pelatihan merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa kegiatan memahirkan. Sebagai suatu proses, manajemen pelatihan berdampingan dengan tiga aktivitas, yakni (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) evaluasi (Daryanto, 2014:120). Ketiga komponen tersebut dapat dijabarkan kedalam sepuluh langkah kegiatan, yang disebut "pendekatan pelatihan sistematis". Pada umumnya daur manajemen pelatihan mengacu ke analisis, mendesain, mengembangkan, mengimple-mentasikan, dan mengevaluasi.

Daryanto (2014:117), menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Langkah 1 : Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pelatihan
- Langkah 2 : Menguji dan Analisis Jabatan dan Tugas Langkah
- Langkah 3 : Klasifikasi dan Menentukan Peserta Pelatihan
- Langkah 4 : Rumuskan Tujuan Pelatihan
- Langkah 5 : Pendesainan Kurikulum dan Silabus Pelatihan
- Langkah 6 : Perencanaan Program Pelatihan
- Langkah 7 : Penyusunan dan Pengembangan Kerangka Acuan
- Langkah 8 : Pelaksanaan Program Pelatihan
- Langkah 9 : Evaluasi Program Pelatihan
- Langkah 10 : Tindak Lanjut Pelatihan

Pada satu sisi Balai Diklat Keagamaan Bandung melaksanakan penyelenggaraan diklat sesuai dengan Standar Kediklatan Teknis dan Sistem Penjaminan Mutu Diklat melalui manajemen diklat, tetapi pada sisi lain masih banyaknya kendala-kendala operasional dalam penyelenggaraan diklat. Diantara beberapa fenomena yang ada yakni, mengapa dalam penyelenggaraan diklat teknis beberapa peserta yang hadir adalah peserta yang sama (pernah mengikuti diklat sebelumnya)? Bagaimana sistem rekrutmen peserta diklat teknis yang dilakukan? Apa kendala yang menyebabkan keterlambatan diterimanya surat undangan oleh peserta diklat teknis? Bagaimana tindak lanjut yang diberikan oleh Balai Diklat bagi peserta diklat teknis yang berhalangan hadir? Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Diklat untuk mengatasi permasalahan klasik yang selalu terulang dalam proses penyelenggaraan diklat teknis?. Dari beberapa identifikasi masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi berujung pada manajemen penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Maka untuk menjawab masalah-masalah tersebut penting kiranya untuk meneliti mengenai manajemen penyelenggaraan diklat. Hal ini terkait bagaimana manajemen penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung dalam kaitannya dengan peningkatkan kompetensi tenaga pendidikan yang diselenggarakan melalui Diklat Teknis Fungsional.

Pembahasan

Profil Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 45 tahun 1981, pada tanggal 27 Juli 1981 lahirlah Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keagamaan Bandung yang ditandai dengan dilantikannya Drs. HME. Djuhany S. Sebagai Kepala Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Bandung. Pada tahun 2004 dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 345 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

Penyempurnaan lebih lanjut pada nomenklatur Balai Diklat dan perubahan UPT nya, dari penyebutan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, begitu juga mengenai UPT Pusdiklat Pegawai Departemen Agama menjadi UPT Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.

Pada periode sekarang yakni terhitung dari tahun 2013 s.d. 2018 Balai Diklat Keagamaan Bandung dikepalai oleh Dr. H. Aep Syaefudin Firdaus, M. Pd. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 19 Juni 1966, pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah S-1 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan menyelesaikan Pascasarjana S-2 dan S-3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum menjadi Kepala Bala Diklat, beliau adalah seorang Guru Madrasah Tsanawiyah dan Mutasi Ke Balai Diklat Bandung menjadi Widyaiswara, dan pernah menjadi Plt. Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis selama ± 6 Bulan. Sosok yang berwibawa, tegas dan berani ini yang ditunjang dengan S-3 dalam kajian Keuangan, menjadikan Balai Diklat Bandung sejak kepemimpinannya penyerapan anggaran dililingkungan UPT Badan Litbang selalu paling tinggi. Begitu juga halnya dengan SIMDIKLAT lebih ditingkatkan lagi baik kapasitas maupun aplikasi yang lainnya, sehingga SIMDIKLAT Bandung lebih komplit dan telah memasuki Versi 4.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung selanjutnya disebut dengan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 716 Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 Telepon: (022) 7800147/70818679 Fax. (022) 7800147. Adapun wilayah pelayanan Balai Diklat Keagamaan Bandung meliputi provinsi Jawa Barat. Tugas Balai Diklat Keagamaan secara umum diatur dalam KMA RI No 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Adapun tugas pokok Balai Dikla Keagamaan Bandung adalah “Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Keagamaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing”.

Fungsi Balai Diklat Keagamaan juga diatur dalam KMA RI No 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Visi, Misi dan Kebijakan Balai Diklat Keagamaan;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Admnistrasi dan Tenaga Teknis Keagamaan;
3. Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
4. Penyiapan dan Penyajian Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Balai Diklat Keagamaan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengembangan Kemitraan dengan Satuan Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Agama, Pemerintah Daerah, serta lembaga terkait lainnya

Organisasi Balai Diklat Keagamaan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Balai Diklat Keagamaan Bandung berbentuk lini dan staf, dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung beserta Pejabat Eselon IV. Adapun rincian dari susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung: Dr. H. Aep Syaefudin Firdaus, M. Pd.
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha: Drs. H. Ade Suryaman, M. Ag.
3. Kepala Seksi Teknis Tenaga Administrasi: Drs. H. A. Syarif Abdurrahman.

Perencanaan Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru

Perencanaan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung secara umum dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya Analisis Kebutuhan Diklat, Rapat Kerja (Raker), Rakor (Rapat Koordinasi), Strategi Pendekatan dan Penyusunan Bahan.

Tujuan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan kompetensi aparatur sipil di seluruh Kemenag Kota/Kabupaten, yang dapat dipenuhi oleh pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis keagamaan, pendidikan, dan teknis administrasi umum. Hasil akhirnya diharapkan berupa deskripsi tentang kebutuhan jenis dan jenjang diklat, serta kurikulum program-program diklat. Hasil ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait untuk penyelenggaraan program-program dimaksud. Kegiatan AKD ini dilakukan secara bertahap di hampir seluruh Kemenag Kota/Kabupaten pada pertengahan tahun 2015 untuk menentukan program diklat yang akan diimplementasikan pada tahun 2016. AKD dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu panitia, daerah yang akan dikunjungi dan waktu pemberangkatan. Ada 27 kabupaten/kota yang dikunjungi, satu lokasi \pm 3-4 orang, satu kali berangkat 3 lokasi yang dikunjungi. Waktu yang dibutuhkan panitia untuk menyebar angket dan menyusun isian adalah 3 hari. Jika di kalkulasikan \pm 3-4 bulan untuk menunggu data terhimpun seluruhnya. Pasca dilakukannya AKD maka data dihimpun secara keseluruhan untuk selanjutnya dirumuskan secara bersama melalui Raker..

Rapat kerja merupakan salah satu implementasi dari fungsi manajemen secara umum, karena melalui rapat kerja ini dibuatkan perencanaan (*planning*) kerja untuk satu tahun kedepan. Rapat Kerja (raker) tahunan BDK Bandung tahun anggaran 2016, bertempat di Hotel Aquarium Kabupaten Pangandaran dari tanggal 20-22 Januari 2016. Dari hasil raker tersebut tersusun rencana kerja program diklat untuk tahun 2016, yaitu:

1. Diklat Kepemimpinan Tk.I IV 1 angkatan
2. Diklat Prajabatan K1-K2 56 angkatan
3. Diklat Teknis Administrasi 5 angkatan
4. DDTK Administrasi 16 angkatan
5. Diklat Calon Penghulu 12 angkatan
6. Diklat Calon Penyuluh 1 angkatan
7. DDLK Keagamaan 7 angkatan
8. Diklat Substantif Keagamaan 5 angkatan
9. Diklat Pengawas 5 angkatan
10. Diklat Fungsional Pendidikan Berjenjang 9 angkatan
11. Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik 5 angkatan
12. DDLK Tenaga Kependidikan 55 angkatan

Setelah dilakukan AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) dan diperoleh rancangan program melalui pelaksanaan raker, maka tahap selanjutnya mensosialisasikan rencana program yang telah disusun pada pertengahan

sampai akhir tahun 2015 tersebut pada kegiatan rakor (rapat koordinasi). Rencana program tersebut disosialisasikan kepada seluruh Kepala Kemenag kota/Kabupaten di seluruh Jawa Barat. Selain mensosialisasikan rencana program diklat, pada rakor juga dilaksanakan evaluasi atas program diklat yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni program pada tahun 2015. Evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan program pada tahun yang akan datang.

Setelah Raker dan Rakor dilaksanakan dan diperoleh jenis program diklat yang akan dilaksanakan tahap selanjutnya yakni menyusun tujuan pelatihan, menyusun kurikulum pelatihan dan menetapkan materi, garis-garis program pembelajaran dan satuan acara serta menyusun media pembelajaran dalam pelatihan secara umum, menyusun matriks narasumber dan menyusun matriks kepanitiaan. Ketentuan lebih rinci dalam penyelenggaraan diklat akan disusun kembali oleh panitia penyelenggara diklat. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Muda Mata Pelajaran IPS MTs. Ruang lingkup materi terdiri atas Mata Diklat Kelompok Dasar, Mata Diklat Kelompok Inti dan Mata Diklat Kelompok Penunjang.

Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru

Ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional (Guru) di BDK Bandung, yakni Langkah Persiapan, Langkah Pelaksanaan dan Langkah Pelaporan. Pada tahap persiapan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan diantaranya: (a) penentuan waktu dan tempat diklat; (b) penetapan panitia penyelenggara; (c) penetapan pemanggilan peserta; (d) penentuan dan undangan narasumber dan moderator; (e) penyusunan jadwal; (f) penyusunan panduan diklat; dan (g) persiapan sarana dan prasarana.

Pada tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan: (a) penerimaan peserta; (b) pengarahan program; (c) pembukaan kegiatan diklat; (d) pelaksanaan proses pembelajaran; (e) pelaksanaan monitoring diklat; (f) pelaksanaan evaluasi diklat; dan (g) penutupan kegiatan diklat. Langkah selanjutnya yakni pelaporan, pada langkah pelaporan terdiri dari tiga jenis pelaporan yakni (a) laporan persiapan penyelenggaraan diklat; (b) laporan penyelenggaraan diklat; dan (c) laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat.

Evaluasi Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru

Ada empat jenis evaluasi dalam pelaksanaan diklat yakni evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, evaluasi terhadap penyelenggara dan evaluasi terhadap program diklat. Adapun yang akan dibahas secara terperinci dalam penelitian ini hanya meliputi 3 (tiga) jenis evaluasi selama penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Muda Mata Pelajaran IPS MTs berlangsung, yakni (a) evaluasi terhadap peserta; (b) evaluasi terhadap Widyaiswara (Wi); dan (c) evaluasi terhadap penyelenggara.

Evaluasi peserta Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Muda Mata Pelajaran IPS MTs mengacu pada Standar Evaluasi yang meliputi 3 komponen yaitu: hasil penilaian tertulis, hasil penilaian produk dan hasil penilaian sikap (*performance*). Penilaian sikap berkaitan dengan perilaku, disiplin,

kehadiran, prakarsa, kerjasama, partisipasi dalam kelas dan tanggung jawab yang diobservasi selama pelaksanaan diklat.

Syarat kelulusan: Kehadiran mengikuti diklat minimal 85%, memperoleh nilai akumulasi minimal 76,00 dengan Prosentase (bobot): nilai ujian tertulis 40%, nilai produk 30% dan nilai sikap 30%.

Bagi peserta yang memperoleh nilai ekumulasi minimal 76%, berhak mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), sedangkan bagi peserta yang memperoleh nilai dibawah 76,00 dinyatakan tidak lulus dan hanya mendapatkan surat keterangan telah mengikuti diklat (Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan).

Evaluasi terhadap widyaiswara/narasumber terdiri dari komponen perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Evaluasi perencanaan pembelajaran dilakukan oleh panitia penyelenggara, sedangkan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh seluruh peserta. Ada dua aspek yang dinilai yakni pengetahuan dan etika yang terbagi menjadi 14 komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengetahuan
 - a. Pengetahuan dan keterampilan mengajar;
 - b. Penguasaan materi;
 - c. Sistematis penyajian;
 - d. Kemampuan menyajikan;
 - e. Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran;
 - f. ketercapaian tujuan.
2. Etika
 - 1) Etika;
 - 2) Sikap terhadap peserta;
 - 3) Cara menjawab pertanyaan peserta;
 - 4) Penggunaan bahasa;
 - 5) Pemberian motivasi;
 - 6) Disiplin waktu;
 - 7) Kerapihan berpakaian;
 - 8) kerjasama (apabila tim)

Evaluasi terhadap penyelenggara (panitia) dilakukan oleh peserta setelah seluruh materi selesai disampaikan. Evaluasi terhadap penyelenggara memiliki enam aspek, yaitu kepesertaan, kepanitiaan, akomodasi, kurikulum, konsumsi, dan sarana diklat.

Panitia penyelenggara kemudian merekap hasil evaluasi terhadap peserta maupun terhadap widyaiswara kedalam SIM DIKLAT melalui akun resmi masing-masing panita penyelenggara. Untuk selanjutnya hasil evaluasi secara keseluruhan dari awal sampai akhir dilaporkan pada Seksi Diklat yang bersangkutan dalam hal ini Seksi Dikleat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Hasil evaluasi terhadap peserta maupun penyelenggara akan diumumkan atau dipublikasikan pada saat penutupan kegiatan diklat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwasannya 4 (empat) dari 6 (enam) *tools of management* (alat manajemen), yakni *Man, Method,*

Material dan Mechines menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan diklat. Adapun secara lebih rinci faktor pendukung dalam penyelenggaraan diklat adalah sebagai berikut:

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia di Balai Diklat Keagamaan Bandung rata-rata sudah terlatih. Pengelola diklat, yakni Kepala Balai Diklat, Kasubag TU, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis, Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi sudah memiliki sertifikat MoT, penyelenggara diklat rata-rata memiliki sertifikat TOC, yakni tentang bagaimana mengelola diklat dan Widyaiswara dengan jumlah yang memadai yakni 46 orang, memiliki sertifikat *Training of Trainer* (ToT) yang sesuai dengan spesialisasinya. SDM di Balai Diklat juga sudah menguasai IT (Informasi Telekomunikasi) baik SIM Diklat maupun *e-office*, tidak ada SDM yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Dengan didukung oleh SDM yang sudah terlatih dan memiliki penguasaan IT maka pelaksanaan diklat akan lebih efektif dan efisien serta menjadikan diklat profesional.

b. *Method* (metode yang digunakan)

Diklat di BDK Bandung ada yang diselenggarakan secara klasikal (*Off the Job Training*) dan ada juga yang diselenggarakan secara non-klasikal (*On the Job Training*). Untuk diklat klasikal dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Bandung, sedangkan untuk nonklasikal dilaksanakan di luar Balai Diklat Keagamaan Bandung dengan pertimbangan agar lebih efektif dalam merealisasikan seluruh program diklat yang sudah disusun. Diklat ini dikenal dengan nama DDLK (Diklat Di Luar Kampus) dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja). Pelaksanaan DDLK dan DDTK lebih efektif karena dalam pelaksanaannya hanya memerlukan 3 orang panitia saja, berbeda dengan diklat di BDK Bandung yang memerlukan 7-8 orang panitia, untuk anggaran yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar karena tidak ada biaya asrama seperti halnya diklat di BDK Bandung. Hal ini menjadikan biaya diklat lebih sedikit, waktu untuk merealisasikan program menjadi lebih cepat, dan program yang direalisasikan juga bisa lebih banyak.

c. *Material* (kurikulum dan sarana prasarana diklat) yang digunakan

Garis besar kurikulum untuk diklat sudah diatur oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Hal ini mempermudah Balai Diklat untuk membuat turunan dari kurikulum yang sudah didesain karena, pada tahap selanjutnya kurikulum akan diatur lebih rinci oleh Balai Diklat Keagamaan masing-masing, menyesuaikan dengan hasil AKD (Analisis Kebutuhan Diklat). Pada tataran teknis untuk menentukan jadwal, materi, Widyaiswara dan lain sebagainya akan diatur oleh panitia penyelenggara.

Sarana dan prasarana yang digunakan juga merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan diklat. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang tersedia maka akan semakin efektif pelaksanaan diklat. Balai Diklat Keagamaan Bandung sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti kelas yang lengkap dengan LCD Proyektor, OHP, Computer dan AC, sudah adanya Lab Komputer, Aula, Asrama, Sarana Olahraga, Lab Bahasa dan MIPA, Taman dan lain sebagainya untuk mendukung terselenggaranya diklat yang efektif, efisien dan profesional.

d. *Mechines* (sistem informasi manajemen diklat yang digunakan)

Balai Diklat Keagamaan Bandung dalam mendukung jalannya diklat dan memudahkan mendata segala kebutuhan penyelenggaraan diklat, baik data mengenai jenis diklat, kepanitiaan, kepesertaan, Widyaiswara dan hal-hal lain terkait kediklatan, sudah menggunakan berbagai aplikasi seperti SIM Diklat Balai Diklat Keagamaan Bandung, e-MPA Kementerian Agama RI, LPSE Kementerian Agama RI, Webmail Kementerian Agama RI, LPSE Provinsi Jawa Barat, Diklat Jarak Jauh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta aplikasi lainnya yang bisa diakses oleh pegawai kediklatan yang memudahkan kerja mereka dan memperlancar jalannya pelaksanaan diklat.

Sedangkan untuk faktor penghambat yakni terdiri dari *money* dan *market*. Secara lebih rinci faktor penghambat kegiatan diklat yakni:

a. *Money* (anggaran diklat)

Anggaran merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan diklat. Balai Diklat Keagamaan Bandung terkadang belum bisa sepenuhnya merealisasikan seluruh program diklat yang telah disusun karena terbatas pada dana yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang terselenggaranya kegiatan diklat. Keterbatasan dana inilah yang pada akhirnya menyebabkan diklat masih berbasis anggaran bukan berbasis.

b. *Market* (distribusi program)

Penyampaian surat atau pemberitahuan adanya kegiatan diklat kepada peserta terkadang terlambat disampaikan oleh Kemenag Kota/Kabupaten yang bersangkutan, sehingga peserta terkadang terlambat menerima informasi adanya kegiatan diklat dan kurang mempersiapkan diri untuk mengikuti diklat, khususnya diklat klasikal yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Oleh karena pentingnya peran Kemenag Kota/Kabupaten dalam membantu mensukseskan kegiatan diklat, maka koordinasi yang baik antara Balai Diklat Keagamaan Bandung dengan Kemenag Kota/Kabupaten sangat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan.

Hasil Manajemen Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

Penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung sesuai dengan Standar Kediklatan Teknis dan Sistem Penjaminan Mutu Diklat Teknis dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Dengan adanya standar kediklatan teknis dan sistem penjaminan mutu tersebut, maka keberhasilan manajemen yang digunakan tergantung pada bagaimana Balai Diklat Keagamaan Bandung mengikuti aturan dan pedoman yang sudah dibuat serta kemampuan menggerakkan sumber daya kediklatan yang ada.

Penggunaan konsep manajemen juga mempengaruhi bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan diklat untuk menjadikan diklat yang profesional. Tidak dipungkiri memang, manajemen sangat penting dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan diklat. Dengan adanya manajemen dalam penyelenggaraan diklat maka hasil yang diperolehpun akan lebih baik, salah satunya yakni pada penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan diklat akan lebih efektif dan lebih efisien.

Pelaksanaan diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi guru di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari ini berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam rapat persiapan

dan ketentuan yang ada dalam pedoman penyelenggaraan diklat. Pelaksanaan diklat yang terbagi menjadi tiga tahapan yakni, tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan diatur dan dikelola dengan baik oleh panitia penyelenggara sehingga pelaksanaan diklat dapat berjalan dengan lancar dan alumni diklat teknis fungsional memiliki kompetensi:

1. Kecerdasan emosional dan spiritual, wawasan kebangsaan, dan komitmen terhadap tugas;
2. Pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional; dan
3. Menerapkan kompetensi jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas.

Secara umum pelaksanaan diklat bertujuan agar peserta diklat memiliki peningkatan dalam 3 (tiga) aspek, yakni *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian/keterampilan) dan *attitude* (sikap) sehingga lulusan atau alumni dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan serta mampu menghasilkan bahan ajar untuk menunjang pembelajaran yang bermakna.

Evaluasi pada Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Muda Mata Pelajaran IPS MTs pada aspek *knowledge* penilaian dilakukan melalui ujian tulis, yakni ujian online yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 02 April 2016. Sedangkan penilaian pada aspek *skill* dilakukan melalui adanya produk yang dihasilkan oleh peserta selama proses pembelajaran. Seperti paper yang dibuat berdasarkan hasil dari Studi Lapangan ke Keraton Cirebon pada hari Kamis, 31 Maret 2016. Sedangkan untuk penilaian *attitude* menggunakan sistem *Reward and Punishment*, yakni setiap peserta yang tiba di Balai Diklat Keagamaan Bandung akan diberi nilai 100, jika peserta melakukan pelanggaran sikap maka akan dikurangi nilainya setiap melakukan 1 pelanggaran 1 nilai. Nilai minimum untuk kelulusan yakni 76,00 sedangkan hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa para peserta diklat mampu melampaui nilai tersebut, untuk urutan pertama yakni Bapak Asep Amanu Sidik dengan nilai 88,66 urutan kedua yakni Pa Cecep Ahmad Gunawan 88,34 dan urutan ketiga yakni Bu Kasdem Kartikasari dengan nilai 87,77 sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan diklat tercapai yakni meningkatnya pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap mental peserta. Selain itu, BDK Bandung bekerjasama dengan kanwil dan Kemenag Kota/Kabupaten untuk ikut menilai para peserta terlebih lagi ketika peserta sudah kembali ke satuan kerja daerah masing-masing.

Simpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan, keberhasilan dari Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru di Balai Diklat Keagamaan Bandung yaitu didukung oleh sumber daya kediklatan yang memadai seperti pegawai kediklatan, panitia penyelenggara dan Widyaiswara yang sudah terlatih dibuktikan dengan mengikuti berbagai pelatihan di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan memiliki sertifikat khusus. Misalnya, syarat umum pengelola diklat harus memiliki sertifikat MoT, persyaratan umum penyelenggara diklat memiliki sertifikat TOC dan bagi Widyaiswara memiliki sertifikat *Training of Trainer* yang sesuai dengan spesialisasinya. *Planning* (perencanaan) merupakan tahapan paling penting

dari suatu fungsi manajemen, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan firasat. Pada tahap perencanaan ini kegiatan pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan model dan siklus diklat. Perencanaan diklat yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung meliputi AKD (Analisis Kebutuhan Diklat), pelaksanaan Raker (Rapat Kerja), pelaksanaan Rakor (Rapat Koordinasi), Strategi pendekatan dan penyusunan bahan diklat.

Setelah segala sesuatu tentang diklat yang telah direncanakan sesuai dengan rancangan, model dan siklus diklat, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan diklat. Tahap *pelaksanaan* diklat secara umum di Balai Diklat Keagamaan Bandung sesuai Standar Kediklatan Teknis dan Standar Penjaminan Mutu Diklat Teknis dibagi menjadi tiga langkah yaitu: (1) langkah persiapan; (2) langkah pelaksanaan; (3) langkah pelaporan. Setiap kegiatan diklat akan diakhiri dengan *evaluasi*. Suatu kegiatan yang bertujuan mengukur keberhasilan diklat dalam pengertian mengukur perbedaan antara keadaan peserta sebelum masuk diklat dengan keadaan peserta sesudah menyelesaikan diklat. Adakah perkembangan, kemajuan, peningkatan kompetensi/kinerja atau malah sebaliknya, menurun atau tetap/tidak mengalami perubahan. Evaluasi juga merupakan kegiatan untuk memilih kegiatan pendidikan selanjutnya, apakah program diklat perlu ditingkatkan. Sistem evaluasi bagi peserta diklat, Widyaiswara, dan bagi panitia penyelenggara di Balai Diklat Keagamaan Bandung sudah didukung dengan adanya SIM DIKLAT yang memudahkan dalam proses evaluasi diklat. Panitia penyelenggara lebih mudah dalam menginput data dan merekap hasil evaluasi dari peserta dan dari widyaiswara melalui SIM Diklat ini.

Daftar Pustaka

- Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Balai Diklat Keagamaan Bandung. (2016). *Buku Pandun Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Muda Pelajaran IPS MTs Tahun 2016*. Bandung: Balai Diklat Keagamaan Bandung Press
- Daryanto. 2014. *Manajemen Diklat*. Yogyakarta: Gava Media
- Gintings, Abdorrahman. 2011. *Esensi Praktis Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Humaniora.
- Kamil, Mustofa. 2012. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 01 Tahun 2003, *Tentang Pedoman dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Jakarta 2003
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 345 Tahun 2004 *Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan*
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
- Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis di Lingkungan Kementerian Agama*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Press

- Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. 2012. *Standar Kediklatan Teknis dan Sistem Penjaminan Mutu Diklat Teknis*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Press
- Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. 2013. *Panduan Evaluasi Diklat Teknis di Lingkungan Kementerian Agama*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Press
- Sedarmyanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.